

PENDAMPINGAN OPERATOR DALAM PEMBUATAN E-KTP PADA KANTOR CAMAT PRAJA LOMBOK TENGAH

Maulana Abdul Rozak^{1*}, Ahmad S. Pardiansyah², Maulana Ashari³

^{1,2,3}STMIK Lombok, Lombok, Indonesia

*Penulis Korespondensi, email: lanamenyoll@gmail.com

Received: 22/06/2023

Revised: 29/06/2023

Accepted: 04/07/2023

Abstract. *For the smooth running of the administration of E-KTP making, the sub-district head must always coordinate with the lower level government, in this case, all staff within the sub-district area and all staff within their respective sub-districts to provide operator assistants. In the method section, the methods used to achieve the goals are to be carried out in community service activities. This section must contain the methods' stages, including preparation, implementation and evaluation. This section also contains complete information about the activities carried out at each stage in the method. The role of the operator's assistant in the implementation of making E-KTP eases the operator's work, expediting the service for making E-KTP so that long queues can be fewer for people who want to make E-KTP.*

Keywords: *Operator assistance, Making E-KTP, Praya sub-district office.*

Abstrak. Untuk kelancaran roda pemerintahan administrasi pembuatan E-KTP, Camat harus selalu mengadakan koordinasi dengan pemerintah tingkat dibawahnya dalam hal ini adalah seluruh staf dilingkungan wilayah kecamatan dan seluruh staf dilingkungan Kelurahan masing – masing untuk di adakan pendamping operator. Pada bagian metode, metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian. Bagian ini harus memuat tahapan pada metode yang digunakan diantaranya: persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Bagian ini juga berisi informasi yang lengkap tentang kegiatan yang dilakukan pada setiap tahapan dalam metode tersebut. Peran pendamping operator pada pelaksanaan pembuatan E-KTP meringankan pekerjaan operator, memperlancar dalam melayani pembuatan E-KTP sehingga antrian yang panjang bisa lebih sedikit bagi masyarakat yang ingin membuat E-KTP.

Kata Kunci: Pendampingan operator, Pembuatan E-KTP, Kantor camat praya.

How to Cite: Rozak, M. A., Pardiansyah, A. S., & Ashari, M. (2023). Pendampingan Operator dalam Pembuatan E-KTP pada Kantor Camat Praya Lombok Tengah. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 99-105. doi: <https://doi.org/10.37478/mahajana.v4i2.2877>

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi sekarang ini semua berkembang sangat pesat tak terkecuali di Negara Indonesia baik perkembangan dalam hal pelayanan, dan teknologi yang dimiliki. Kualitas pelayanan merupakan suatu fenomena yang unik, sebab dimensi dan indikatornya dapat berbeda diantara orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Kualitas pelayanan menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan tuntutan setiap konsumen. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kualitas pelayanan adalah yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap konsumen. Kualitas pelayanan ini bukanlah suatu hal yang permanen atau kaku, melainkan fleksibel dan dapat berubah. Perubahan ini tentunya berupa peningkatan kualitas pelayanan agar semakin lebih baik lagi. Dalam proses perubahan peningkatan kualitas pelayanan tersebut perlu diberlakukan survey atau observasi kepada masyarakat termasuk didalamnya berupa masukan pendapat maupun pelayanan yang telah dilakukan (Farmila, Andri & Tua, 2022).

Berbagai kegiatan pemerintah menuntut adanya pertanggungjawaban kegiatan pemerintah yang dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban tanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu laporan yang dilaksanakan secara periodik yaitu laporan keuangan. Hal ini sangat berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan salah satu bagian dalam kegiatan system akuntansi penggajian dan sebagai faktor akan mencapai suatu kinerja (Cahyadi, Andrianto & Apriyanti, 2020).

Menurut (Nicholas Hendry, 2017) "Administrasi public adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap

pemerintah dalam hubungan nya dengan masyarakat yang di perintah dan juga mendorong kebijakan public agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial". Di satu sisi untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik, yang diharapkan dapat menghasilkan layanan publik yang adil, transparan, efisien, dan manfaatnya dirasakan oleh semua warga masyarakat, fungsi dan manfaat dari penggunaan e-KTP antara lain: (1) merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamankan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dan terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat, (2) mencegah adanya pemalsuan, (3) mencegah adanya penggandaan penggunaan KTP, (4) kebutuhan untuk mewujudkan keamanan negara, (5) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, (6) kartu bukti tanda penduduk Indonesia, (7) dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu, pilkada dan lain-lain, (8) pengidentifikasian untuk memecahkan suatu perkara kejahatan yang sulit seperti terorisme, pembobolan bank via ATM, pemilikan KTP ganda, dan lain-lain, (9) membuat pengembangan teknologi identifikasi semakin diperlukan, dan (10) lebih awet penggunaanya sampai 10 tahun. (Oktaf, 2011).

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik atau jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, birokrasi publik berkewajiban serta bertanggung jawab. untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional. Dalam kondisi perkembangan masyarakat yang dinamis, pihak birokrasi harus dapat memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif (Retno Saraswati, 2013).

Sektor pemerintahan dalam hal ini turut memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya volume pekerjaan yang ada di sektor pemerintahan dan semakin menggiurkannya tawaran dari teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan suatu hasil yang efisien, produktif dan tranparansi. Di satu sisi untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik, yang diharapkan dapat menghasilkan layanan publik yang adil, transparan, efisien, dan manfaatnya dirasakan oleh semua warga masyarakat tanpa kecuali adalah merupakan salah satu tujuan pengembangan electronic government oleh pemerintah (Retno Saraswati, 2013).

Pelayanan pembuatan KTP merupakan salah satu contoh bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Diperlukan konsistensi untuk terus memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kualitas pelayanan dari segala aspek dalam pembuatan E-KTP (Widiati, 2020). Untuk kelancaran roda pemerintahan administrasi, Camat harus selalu mengadakan koordinasi dengan pemerintah tingkat dibawahnya dalam hal ini adalah seluruh staf di lingkungan wilayah kecamatan dan seluruh staf dilingkungan Kelurahan masing - masing serta dalam hal ini ini Camat harus melakukan koordinasi dengan para aparat atau pejabat di tingkat atasannya dan aparat yang setingkat dalam tingkat organisasi, dengan adanya koordinasi yang baik maka dapat mewujudkan suatu tujuan yang serempak, penyatuan dan penyelarasan kegiatan-kegiatan pemerintahan sehingga tidak berjalan sendiri – sendiri (Ashari, 2014).

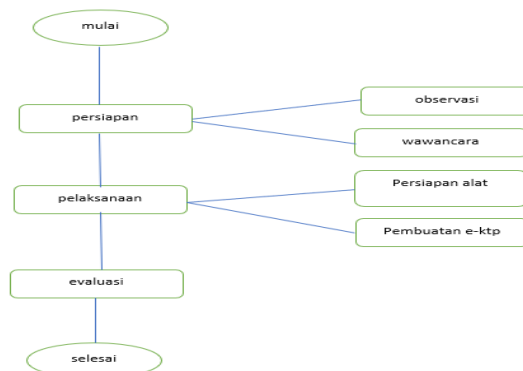
Camat senantiasa harus dapat melakukan kordinasi sehingga tidak terjadi kesenjangan disegala dibidang (Zainudin, Arisinta & Sahid, 2018). Sekalipun pada umumnya telah disadari tentang pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan e-KTP dan manajemen pemerintah, tetapi kenyataannya dalam pelaksanaannya tidak jarang terdapat berbagai kendala yang mengakibatkan proses koordinasi tidak berjalan sebagaimana mestinya (Kariadin & Nurbaena, 2019). Di Kecamatan praya, peran Camat sangat mempengaruhi kesuksesan suatu pelayanan di kecamatan tersebut karena hampir setiap hari banyak masyarakat Kecamatan Praya yang berurusan dengan aparat/pegawai dikantor tersebut. Namun dalam kenyataannya peran Camat pada Kantor Kecamatan Praya belum maksimal terlaksana khususnya dalam pelayanan pembuatan e-KTP, hal ini terlihat pada pelayanan pegawai pada Kantor Kecamatan Praya yang masih terlihat lambat dalam melayani

pembuatan e-KTP, sehingga membuat antrian yang panjang bagi masyarakat yang ingin membuat e-KTP (Fekhiatin, et al. 2013).

Jadi dengan demikian untuk mengatasi kendala tersebut perlu adanya koordinasi yang menyeluruh yang dilakukan oleh Camat agar pelaksanaan administrasi pemerintahan dikecamatan praya kabupaten praya dapat berjalan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan perlu diada kan peningkatan kerja sama yang baik antara camat dengan pegawai maupun instansi terkait yg ada didalamnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dari itu penulis tertarik mengambil judul “pendampingan dalam pembuatan e-KTP di Kantor Kecamatan praya”

METODE PELAKSANAAN

Pada bagian metode, metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian. Bagian ini harus memuat tahapan pada metode yang digunakan diantaranya: persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Bagian ini juga berisi informasi yang lengkap tentang kegiatan yang dilakukan pada setiap tahapan dalam metode tersebut.



Gambar 1. Tahap kegiatan pengabdian

Kegiatan pendampingan operator dalam pembuatan e-ktp pada kantor camat praya di mulai dari proses.

1. Persiapan

Persiapan yg di lakukan oleh pendamping operator sebelum kegiatan pembuatan E-KTP adalah:

a. Obsevasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan menggunakan panca indra mata di bantu dengan panca indra lain nya. Menurut Hasyim Hasanah (2017) metode observasi adalah metode pengumpulan data yang di gunakan untuk mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks melalui panca indra tanpa manipulasi. Observasi yang dilakukan pada kegiatan ini adalah menghimpun data tentang proses pembuatan E-KTP pada kantor Camat Praya

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu, pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan pada kegiatan ini bersama dengan operator dan pihak yang bertanggung jawab dalam sistem pembuatan E-KTP.

2. Pelaksanaan

Dalam kegiatan pelaksanaan, pendamping operator memulai kegiatan pembuatan E-KTP. Adapun tahapan dalam pembuatan E-KTP adalah :

- Persiapan alat dan bahan untuk perekaman E-KTP.
- Verifikasi data pemohon
- Pelaksanaan rekaman
- Mengkonfirmasi hasil perekaman E-KTP oleh operator.
- Mencetak E-KTP pemohon apabila syarat dan ketentuan telah terpenuhi.

3. Evaluasi

Menurut Nurkancana (1983), evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan yang berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Evaluasi pada akhir kegiatan ini dilakukan oleh operator atau kepala bagian yang membawahi dan bertanggung jawab atas kegiatan pembuatan E-KTP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang telah dilakukan berlangsung selama 45 hari pada Kantor Camat Praya kabupaten Lombok Tengah. Adapun hasil dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan adalah:

1. Persiapan

Pada tahap persiapan ini, penulis mengumpulkan data terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu:

a. Observasi

Observasi dilakukan di kantor Camat Praya terutama pada kegiatan pembuatan E-KTP. Kegiatan observasi bertujuan untuk melihat langsung dan belajar cara pembuatan E-KTP agar bisa mendampingi operator.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui lebih detail tentang sistem pembuatan E-KTP. Wawancara ini dilakukan bersama operator E-KTP Bapak Hakim selaku operator.



Gambar 2. wawancara operator

2. Pelaksanaan

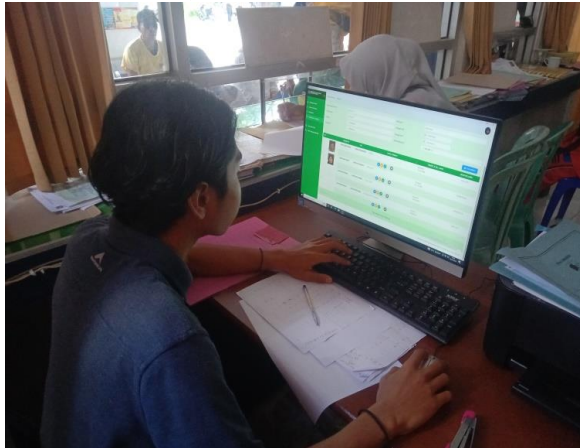
Pada tahap pelaksanaan ini pendamping membantu untuk mempermudah atau meringankan operator dalam proses pelaksanaan pembuatan E-KTP (Rusdi, 2019). Tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah:

a. Pendamping operator mempersiapkan alat dan bahan.



Gambar 3. Persiapan alat dan bahan

- b. Pendamping operator melakukan verifikasi data pemohon pada dokumen kartu keluarga dan data base. Didalam kartu keluarga akan ada informasi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, NIK.



Gambar 4. Pendamping memverifikasi data pemohon.

- c. Pendamping operator melakukan pelaksanaan rekaman, Foto digital, rekam sidik jari, scan retina mata dan tanda tangan kepada pemohon pada pelaksanaan pembuatan E-KTP. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat di baca secara elektronik dengan alat pembaca dan pengaman data kependudukan (Setiawan & Manar, 2013).



Gambar 5. Perekaman pembuatan E-KTP

- d. Pendamping operator mengkonfirmasi hasil perekaman pembuatan E-KTP selanjutnya Operator membubuhkan TTD yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto sidik jari scan retina mata, tanda tangan.
- e. Pendamping operator mencetak E-KTP pemohon apabila syarat dan ketentuan telah terpenuhi Pembuatan E-KTP selesai.
3. Evaluasi

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Uraikan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada hasil evaluasi pendampingan operator pembuatan E-KTP pada camat praya di berikan langsung oleh bapak H.Wirayuda,SH selaku pembimbing lapangan yang menjabat sebagai sekcab atau yang bertanggung jawab.

No.	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI										KET
		Berkas (Nilai 1)	Nilai Angka (Nilai 2)	Nilai Angka (Nilai 3)	Nilai Angka (Nilai 4)	Nilai Angka (Nilai 5)	Nilai Angka (Nilai 6)	Nilai Angka (Nilai 7)	Nilai Angka (Nilai 8)	Nilai Angka (Nilai 9)	Nilai Angka (Nilai 10)	
1.	Bagaimana disiplin kerja dan etika kerja?	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	
2.	Apakah ada yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan atau masalah yg diberikan oleh instansi/ lembaga/ perusahaan?	84										
3.	Apakah ada yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan atau masalah yg diberikan oleh instansi/ lembaga/ perusahaan?	83										
4.	Apakah ada yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan atau masalah yg diberikan oleh instansi/ lembaga/ perusahaan?	84										
5.	Bagaimana sikap dan etika yang diberikan oleh instansi/ lembaga/ perusahaan?	84										
Total Nilai (TN)		84										
Nilai Akhir (NA = TN/5)		16.8										

Disini kami informasikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Praya, 23 - 8 - 2023
Pembimbing Lapangan
(Signature)
H. H. H. H.

Gambar 6. Hasil evaluasi pendampingan

SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Di era otonomi daerah, pelayanan yang diberikan oleh lembaga pelayanan harus mampu memenuhi harapan masyarakat. Selain itu, pelayanan yang diberikan juga harus berkualitas dan memuaskan masyarakat. Pelayanan publik sebagai salah satu fokus disiplin ilmu Administrasi Publik tetap menarik untuk dicermati karena pelayanan yang diberikan lembaga pelayanan pemerintah masih dinilai kurang memuaskan. Kantor Kecamatan Praya sebagai salah satu instansi pelayanan kependudukan harus dapat memberikan pencatatan data e-KTP yang baik dan tepat waktu. Agar pelaksanaan administrasi pemerintahan dikecamatan praya kabupaten praya dapat berjalan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan perlu diadakan peningkatan kerja sama yang baik antara camat dengan pendampingan operator E-KTP maupun instansi terkait yg ada didalamnya. Peran pendamping operator pada pelaksanaan pembuatan E-KTP meringankan pekerjaan operator, memperlancar dalam melayani pembuatan E-KTP sehingga antrian yang panjang bisa lebih sedikit bagi masyarakat yang ingin membuat E-KTP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, Ade H. (2014). Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, vol. 1, no. 1
- Cahyadi, S., Andrianto, T., & Apriyanti, A. (2020). Pendampingan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(1), 85 - 104. <https://doi.org/10.37641/jadkes.v1i1.1301>
- Farmila, R. A., Andri, S., & Tua, H. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-Ktp Pada Bagian Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kantor Camat VII Koto Sungai Sarik. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(3), 1949-1966. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.4995>
- Febriharini, M. P. (2016). Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan. *Serat Acitya -Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 5(No. 2), 18.
- Fekhiatin, A., et al. (2013). EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM ELECTRONIC KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DI KABUPATEN TEGAL DALAM MEWUJUDKAN ELECTRONIC GOVERNMENT (E-GOV). *Journal of Politic and Government Studies*, 2(3), 26-35. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/2842>
- Gondohanindijo, J. (2012). KTP Elektronik (e-KTP) Bagi Penduduk Indonesia. *Majalah Ilmiah Informatika*, 3(1), 164-184. <http://www.unaki.ac.id/ejournal/index.php/majalah-ilmiah-informatika/article/view/57>

- Kariadin, K., & Nurbaena, W. O. (2019). Peranan Aparat Dalam Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi. *Kybernani: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 2(1), 53-65. <https://doi.org/10.35326/kybernani.v4i1.311>
- Mulyadi, A. (2013). Peran Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Pembuatan Ktp Elektronik. *E.Journal Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 1244-1256.
- Prasetyo, A., & Soemarmi, A. (2013). Diponegoro Law Review Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013. *Jurnal Undip*, 1(7), 1-11. https://www.mendeley.com/catalogue/572d219f-4175-39c0-98c4-f41327e3e68d/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B7791ba13-f2a3-43cb-bf55-841e5d6d3d10%7D
- Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2), 161-169. <https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271>
- Retno Saraswati, A. W. U. S. H. (2013). PENERAPAN e-KTP DI KOTA SEMARANG. *Diponegoro Law Journal*, 2(2), 1-19. <https://doi.org/10.14710/dlj.2013.3881>
- Riska Elen, M. (2022). RESPONSIVITAS MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENERBITAN KTP ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(4), 377-385. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i4.1388>
- Rusdi, R. (2019). Peran Motivasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Catatan Sipil Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 3(3). <https://doi.org/10.36982/jpg.v3i3.675>
- Saparwadi, L. (2022). Pendampingan dalam Sosialisasi Adminduk. *SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 239. <https://doi.org/10.35329/sipissangngi.v2i3.3265>
- Septiyarini, D., & Pranaka, R. N. (2019). Implementasi Program Dan Pemanfaatan E-Ktp Yang Terintegrasi Di Kabupaten Sambas. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(1), 30. <https://doi.org/10.31289/publika.v7i1.2173>
- Setiawan, A., S, R. H., & Manar, D. G. (2013). Efektifitas Penerapan E-Government Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen Dalam Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). *Journal of Politic and Government Studies*, 2(3), 1-15. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/2835>
- Sunandi, E., Agustina, D., & Fransiska, H. (2021). Pendampingan Perangkat Desa untuk Pelatihan Pembuatan Infografis Data Kependudukan Desa. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.30651/aks.v5i2.3726>
- Widiati, W. (2020). SERVICE STANDARDS FOR MAKING E-KTP IN THE KECAMATAN BATI-BATI OFFICE (BASED ON REGENT REGULATION NUMBER 29 OF 2018). *PubBis : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 4(2), 113-125. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v4i2.274>
- Wiji Lestari, B., Dera Pua Rawi, R., Muthia Wangsi, M., Aeni Waly, N., & Candra Bintari, W. (2021). Pendampingan Pengisian Aplikasi Data Pokok Pendidikan Pada Operator Sekolah Di Tk Aisyah Bustanul Athfal 6. *DINAMIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 99-107. <https://doi.org/10.33752/dinamis.v1i2.518>
- Zainudin, Arisinta, O., & Sahid, M. (2018). SIMDES (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DESA) . *JA (Jurnal Abdiku) : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 81-88. Retrieved from <http://publikasi.stkippgri-bkl.ac.id/index.php/JA/article/view/343>